

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis kerja sama impor minyak Indonesia–Arab Saudi dengan menggunakan teori perdagangan internasional sebagai kerangka analitis utama. Pergeseran pendekatan teori dari konstruktivisme ke teori perdagangan internasional memungkinkan penelitian ini untuk memahami hubungan bilateral kedua negara secara lebih struktural dan rasional, terutama dalam konteks ekonomi politik internasional dan perdagangan komoditas strategis. Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, khususnya Subbab 4.3, dapat disimpulkan bahwa kerja sama impor minyak antara Indonesia dan Arab Saudi bukan merupakan fenomena yang didorong oleh faktor identitas, kedekatan normatif, atau solidaritas politik semata, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan struktur ekonomi, keunggulan komparatif, serta kebutuhan energi nasional yang bersifat jangka panjang.

Indonesia berada pada posisi struktural sebagai negara net-importer minyak akibat keterbatasan kapasitas produksi domestik yang tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi energi nasional. Dalam perspektif keunggulan komparatif sebagaimana dikemukakan oleh David Ricardo, impor minyak merupakan pilihan rasional karena produksi domestik akan menimbulkan biaya peluang yang tinggi dan tidak efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak tidak dapat dipahami sebagai kegagalan kebijakan energi semata, melainkan sebagai refleksi dari rasionalitas perdagangan internasional dalam sistem ekonomi global yang saling bergantung.

Sebaliknya, Arab Saudi memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam produksi minyak bumi, yang ditopang oleh kelimpahan sumber daya alam, biaya produksi yang rendah, serta kapasitas teknologi yang mapan. Dalam kerangka teori Heckscher–Ohlin, posisi Arab Saudi sebagai eksportir minyak mencerminkan kelimpahan faktor produksi berupa sumber daya alam, sementara

Indonesia mengimpor minyak karena keterbatasan faktor tersebut. Pola perdagangan ini menunjukkan adanya pembagian kerja internasional yang bersifat struktural dan relatif stabil.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan impor minyak Indonesia–Arab Saudi menciptakan interdependensi yang bersifat asimetris. Indonesia memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pasokan minyak dari Arab Saudi dibandingkan ketergantungan Arab Saudi terhadap pasar Indonesia. Interdependensi asimetris ini berdampak pada posisi tawar kedua negara, khususnya dalam konteks kerja sama lanjutan di sektor hilir migas dan investasi strategis. Dalam perspektif teori perdagangan internasional dan ekonomi politik internasional, kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kepentingan ekonomi dan struktur pasar global.

Kegagalan realisasi kerja sama investasi Saudi Aramco di sektor hilir migas Indonesia tidak menunjukkan melemahnya hubungan perdagangan minyak antara kedua negara. Sebaliknya, hal tersebut menegaskan bahwa perdagangan komoditas dan kerja sama investasi strategis merupakan dua ranah yang dapat berjalan secara terpisah. Perdagangan minyak tetap berlangsung karena didorong oleh kebutuhan struktural dan efisiensi ekonomi, sementara investasi lintas negara tunduk pada kalkulasi keuntungan, risiko, dan peluang alternatif di pasar global. Temuan ini memperkuat argumen teori perdagangan internasional bahwa integrasi ekonomi yang lebih dalam tidak selalu terjadi secara otomatis meskipun hubungan perdagangan dasar telah terjalin dengan stabil.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama impor minyak Indonesia–Arab Saudi merupakan manifestasi dari logika perdagangan internasional yang rasional, struktural, dan asimetris. Teori perdagangan internasional terbukti relevan dan memadai untuk menjelaskan dinamika hubungan energi kedua negara, serta memberikan pemahaman yang lebih objektif terhadap keberlanjutan perdagangan dan keterbatasan kerja sama strategis yang lebih mendalam.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini, terdapat beberapa saran teoritis yang dapat diajukan untuk pengembangan kajian hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya penggunaan teori perdagangan internasional dalam menganalisis hubungan bilateral yang melibatkan komoditas strategis seperti energi. Kajian hubungan internasional di masa mendatang perlu lebih banyak mengintegrasikan pendekatan ekonomi politik internasional untuk menghindari analisis yang terlalu normatif dan kurang mempertimbangkan faktor struktural ekonomi global.

Kedua, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi lanjutan yang mengombinasikan teori perdagangan internasional dengan pendekatan interdependensi asimetris dan rantai nilai global. Pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perdagangan, investasi, dan kekuasaan ekonomi saling berinteraksi dalam hubungan antarnegara, khususnya dalam sektor energi.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas unit analisis dengan membandingkan hubungan perdagangan energi Indonesia dengan negara eksportir minyak lainnya. Pendekatan komparatif tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai variasi pola interdependensi dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan energi global, serta menguji konsistensi teori perdagangan internasional dalam konteks yang lebih luas.

### 5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa ketergantungan

impor minyak merupakan kondisi struktural jangka menengah yang tidak dapat dihilangkan secara instan. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional perlu difokuskan pada pengelolaan ketergantungan tersebut secara rasional melalui diversifikasi sumber impor dan peningkatan efisiensi konsumsi energi.

Kedua, dalam menjalin kerja sama dengan negara eksportir minyak seperti Arab Saudi, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan meningkatkan kapasitas domestik di sektor hilir migas. Peningkatan kapasitas kilang dan infrastruktur energi akan memungkinkan Indonesia mengurangi impor produk bahan bakar bernilai tinggi dan meningkatkan nilai tambah domestik, sehingga memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu memisahkan secara jelas antara kerja sama perdagangan komoditas dan kerja sama investasi strategis. Stabilitas perdagangan minyak tidak secara otomatis menjamin keberhasilan investasi asing. Oleh karena itu, kebijakan investasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kepastian regulasi, kelayakan ekonomi proyek, dan daya saing Indonesia dibandingkan negara tujuan investasi lainnya.

Keempat, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan ekonomi dalam diplomasi perdagangan dan energi. Diplomasi energi Indonesia sebaiknya tidak hanya menekankan aspek hubungan baik dan solidaritas, tetapi juga memperkuat argumen ekonomi yang berbasis efisiensi, keuntungan bersama, dan kepentingan jangka panjang. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan struktural dalam sistem perdagangan energi global.